

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro dan kecil (UMK) termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia secara nasional telah menunjukkan bahwa kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang. (Marcellina, 2012).UMKM merupakan kelompok usaha yang beroperasi di sektor informal dan padat karya sehingga dinilai mempunyai peran strategis sebagai sumber pencipta lapangan kerja.

Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997-1998 berdampak pada besarnya jumlah pekerja formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat dari banyaknya perusahaan-perusahaan besar di sektor formal yang mengalami kebangkrutan. Akibat belum adanya sistem jaminan sosial yang baik terutama sistem pemberi tunjangan pengangguran yang ada di negara ini, maka banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan menganggur. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi mereka yang menganggur untuk bekerja di sektor informal maupun membuka usaha sendiri di sektor informal. Setiawan, (2011) di dalam Sari, (2013).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensinya, ketangguhan maupun

kontribusinya terus meningkat. Menurut Partomo dan Soejodono (2004) di dalam Sari (2013) keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia, yang menjadikan UMKM terus bertahan disaat krisis ekonomi adalah karena, pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga bank naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri. Ketiga, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja di sektor formal, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran, pada akhirnya menyebabkan para penganggur memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah UMKM.

Berdasarkan data pada Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2011. Sedangkan peran UMKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 4.303,6 triliun atau 57,94 persen dari total PDB nasional. Dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 101.722.458 orang atau 97,24 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada.

Kebanyakan Usaha Mikro dan Kecil UMK umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya

mampu untuk diekspor. Mengingat UMK umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMK diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki daya saing yang kuat jika UMK telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro dan kecil perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM antara lain adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan. Modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil lebih banyak mengandalkan modal pribadi dan perputaran hasil usaha yang diperoleh.

Menurut Desanto (2007) di dalam Habibi (2014) menambah modal bagi industri kecil bukan hal yang mudah. Bagi pengusaha kecil menengah meminjam uang di bank selain harus menanggung bunga yang cukup tinggi juga melalui prosedur yang tidak mudah. Selain itu tidak adanya jaminan anggunan merupakan alasan utama bagi sebagian besar UMKM untuk tidak mengajukan permohonan kredit kepada perbankan, tetapi lebih memilih pihak-pihak penyedia dana atau lembaga-lembaga non bank seperti rentenir. Dalam kondisi yang demikian, usaha mikro dan kecil (UMK) ini akan sangat sulit keluar dari

permasalahan keterbatasan modal tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain seperti pemerintah.

Menurut Iman dan Adi, (2009) di dalam Afifah, (2012) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Mengingat besarnya peran UMKM terhadap perekonomian nasional maupun daerah, dan masih banyak lagi hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM salah satunya seperti keterbatasan modal yang dimiliki, maka pada tanggal 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dan Koperasi. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30%

ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Usaha Mikro dan Kecil mempunyai jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan unit Usaha Besar. Dimana pada tahun 2006 jumlah UMKM se Sumbar mencapai 501.410 unit, dimana jumlah unit Usaha Mikro (UMi) sebanyak 423.280 unit, Usaha Kecil (UK) sebanyak 74.410 unit dan Usaha Menengah dan Besar sebanyak 3.720 unit.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu bagian dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Letak Kota Payakumbuh sangat strategis bila dilihat dari segi lalu lintas angkutan darat Sumbar-Riau. Kota Payakumbuh merupakan pintu gerbang masuk dari arah Pekanbaru menuju kota-kota penting di Provinsi Sumatera Barat. Berbagai jenis angkutan baik angkutan umum dan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor sangat ramai melewati kota ini pada waktu siang maupun pada malam hari. Seiring dengan letaknya yang strategis dan menghubungkan dua Provinsi antara Sumatera Barat dan Provinsi Riau, maka pertumbuhan industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Menurut data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Payakumbuh, selama 5 tahun terakhir perkembangan jumlah UMKM di kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada table 1.1 :

Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota
Payakumbuh Tahun 2010 - 2014

No	JENIS USAHA	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Usaha Mikro	13.222	13.883	14.160	14.529	14.935
2	Usaha Kecil	4.680	4.914	4.963	5.075	5.217
3	Usaha Menengah dan Besar	200	200	200	202	207
JUMLAH		18.102	18.997	19.323	19.806	20.359

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh

Dari data 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di kota Payakumbuh tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif. Hal ini dicerminkan dengan adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif setiap tahunnya. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil dikota Payakumbuh melalui program kredit usaha rakyat (KUR) yang merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable).

Dengan melihat penjelasan di atas, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya permasalahan dalam hal permodalan, serta upaya pemerintah untuk terus mendukung keberadaan dan kemajuan UMKM terutama dalam hal bantuan atas modal, maka dampak yang ditimbulkan dari adanya bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja usaha mikro dan kecil penting untuk diteliti. Maka daripada itu penelitian ini ingin melihat efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditinjau dari perbedaan variabel modal, tenaga kerja, omzet penjualan, dan keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KOTA PAYAKUMBUH**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata modal, tenaga kerja, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro dan kecil di kota Payakumbuh sebelum dan sesudah kredit usaha rakyat ?
2. Apakah terdapat peningkatan rata-rata modal, tenaga kerja, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro dan kecil di kota Payakumbuh sebelum dan sesudah kredit usaha rakyat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan rata-rata modal, tenaga kerja, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro dan kecil di kota payakumbuh sebelum dan sesudah kredit usaha rakyat .
2. Untuk mengetahui Apakah terdapat peningkatan rata-rata modal, tenaga kerja, omzet penjualan, dan keuntungan usaha mikro dan kecil di kota payakumbuh sebelum dan sesudah kredit usaha rakyat ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisis pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja UMK di kota Payakumbuh.
2. Bagi penulis penelitian ini merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan
4. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja UMK di Kota Payakumbuh. Variabel yang diteliti adalah modal, tenaga kerja, omzet penjualan dan keuntungan para pengusaha yang menerima KUR. Penelitian ini diperoleh melalui survey langsung ke lapangan, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara langsung. Adapun yang menjadi objek penelitian di dalam penelitian ini adalah para pengusaha usaha mikro dan kecil yang terdaftar di dalam UMKM binaan kota Payakumbuh pada tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 498 orang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengklasifikasikan penulisan agar lebih jelas dengan memberi batasan-batasan sesuai dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian penjelasan mengenai ruang lingkup penelitian dan pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran konseptual. Pada bab ini juga disusun Hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai kondisi umum daerah dan kemudian menjelaskan perkembangan perekonomian Kota Payakumbuh.

BAB V : ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Analisis data untuk pengujian hipotesis, serta pembahasan atas hasil analisis.

BAB VI : PENUTUPAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan singkat dari penelitian.